

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan tahun 1998, tata pemerintahan Indonesia dijalankan secara sentralisasi. Segala wewenang dalam mengeluarkan dan menetapkan kebijakan dan keputusan ada di tangan pemerintah pusat. Daerah hanya menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut Undang-Undang (UU).

Namun, model sentralisasi yang selama ini dijalankan oleh pemerintah pusat tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat mengalami kesulitan dalam mengelola berbagai sumber daya yang ada di tiap-tiap daerah. Selain itu, kebijaksanaan sentralisasi baik secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi kreativitas tiap daerah dalam mengelola wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, dilakukan relokasi kewenangan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang sering disebut sebagai bentuk desentralisasi yang diberlakukan sejak tahun 1999.

Pada prinsipnya, otonomi daerah merupakan bentuk konkrit dari pelaksanaan desentralisasi. Adapun konsep dasar otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah masing-masing (Yuwono, 2008:13). Otonomi daerah merupakan pelimpahan segala hak, wewenang dan

kewajiban sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam dan untuk mengatur serta mengurus sendiri daerah atau wilayahnya.

Secara prinsip, Undang-undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan pada pasal 18 ayat (6) menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari

pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat (Maimunah, 2008).

Dana Alokasi Umum memegang peranan yang sangat dominan dibanding Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Untuk itu diharapkan Dana Alokasi Umum digunakan dengan sebaik-baiknya agar tetap dapat memaksimalkan daerah untuk membiayai setiap kebutuhan yang diperlukan daerah. Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut.

Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Simanjuntak dalam Sidik et al dalam Maimunah, 2008).

Sampai saat ini otonomi daerah sudah berjalan pada setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat dalam mengatur daerahnya. Hal ini jelas terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah dimana pemerintah daerah masih bergantung pada kucuran dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Setiap pulau atau setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Hal ini bisa dilihat baik dari keadaan geografis maupun keadaan ekonominya. Daerah

penelitian yang dipilih adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Utara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Alasan pemilihan daerah penelitian ini disebabkan karena adanya perbedaan fluktuasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tiap pulau. Dimana Dana Alokasi Umum pada pulau Sumatera paling tinggi peningkatannya dibandingkan dengan Dana Alokasi Umum pada pulau lainnya. Seperti yang terlihat pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1
DAU Pemda Setiap Pulau di Indonesia Menurut Propinsi Tahun 2006 – 2008
(dalam juta rupiah)

Nama Pulau	Tahun		
	2006	2007	2008
SUMATERA	3.658.497	4.462.701	4.862.923
JAWA	3.697.748	3.963.242	3.835.229
KALIMANTAN	1.589.241	1.845.917	1.991.088
NUSA TENGGARA	1.236.887	1.437.780	1.576.076
SULAWESI	2.464.481	2.581.219	3.097.920
MALUKU dan PAPUA	1.924.520	2.187.938	2.588.234

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara (2006 - 2008)

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah Dana Alokasi Umum di pulau Sumatera dari tahun 2006 – 2008 sangat besar dibandingkan dengan pulau lainnya. Dana Alokasi Umum pulau Sumatera mengalami fluktuasi peningkatan tertinggi pada tahun 2007 dibandingkan pulau lainnya yaitu sebesar 804.204

Fenomena utama dalam penelitian ini adalah terjadinya *flypaper effect* yang merupakan suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon

(melakukan belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) daripada menggunakan kemampuan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 2007).

Penelitian sebelumnya seperti Maimunah (2008) yang meneliti di Pulau Sumatra, Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Diah (2007) yang meneliti di Indonesia, serta Syukriy (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut berarti terjadi *flypaper effect*. Hal ini sesuai dengan hipotesisnya yang menyatakan pengaruh DAU terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap BD diterima.

Perkembangan Dana Alokasi Umum seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 yang merupakan transfer dana dari pemerintah pusat dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
DAU PemKab/PemKo di Sumatera Utara Tahun 2006 - 2008(dalam juta rupiah)

Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
	2006	2007	2008
NIAS	315773,04	343779	393414,35

Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
	2006	2007	2008
MANDAILINGNATAL	298969	338364	394434
TAPSEL	455036	501085	528955
TAPTENG	226435	259019	290589
TAPUT	286277	320942	338051,6
TOBASA	210442	239982	252144
LABUHANBATU	471211	536778	578103
ASAHAN	493236	546637	422761,73
SIMALUNGUN	528358	586985	639593
DAIRI	272429,82	304080	327408,43
KARO	334102	373637	395779
DELISERDANG	637495	708480	779762,11
LANGKAT	484070	545650	583481
NIASSELATAN	194107,41	231315	258078,78
HUMBANGHASUNDUTAN	199863	234493	251601
PAKPAKBARAT	127760	145900	155875
SAMOSIR	184943	344516	219458,18
SERDANGBEDAGAI	303500,66	344516	381432
SIBOLGA	163031	184634	209457,47
TANJUNGBALAI	174380	197642	224503,92
PSIANTAR	251255	278407	312043
TTINGGI	179085	200708	224504

MEDAN	574550	748707	808664,57
BINJAI	226850	254241	276422,52
PSIDEMPUAN	200749	225865	257153

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara (2006 - 2008)

Dari Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara senantiasa berubah. Dana Alokasi Umum seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan.

Selain dari dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Kemandirian setiap daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat dilihat secara jelas dari kemampuan sumber daya keuangan daerah untuk membangun daerahnya serta kemampuan bersaing dengan daerah lain secara sehat. Tingkat kemandirian daerah tersebut dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Asli Daerah yang sah lainnya. Semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka semakin kecil pula ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terhadap

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Utara setiap tahunnya meningkat.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3
PAD PemKab/PemKo di Sumatera Utara Tahun 2006 – 2008 (dalam juta rupiah)

Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
	2006	2007	2008
NIAS	8301,59	15466,75	18319,18
MANDAILINGNATAL	8254,34	11927,22	13204
TAPSEL	14903,78	25827,56	14014
TAPTENG	7373,11	10390,78	10391
TAPUT	6725,47	5904,47	6790
TOBASA	10375,6	8841,45	8842
LABUHANBATU	32144,5	38671,08	46582
ASAHAN	23879	24565,37	18923,42
SIMALUNGUN	20952,72	33952,95	34531
DAIRI	9449,35	6563,68	7210,85
KARO	15194,56	18191,16	18498
DELISERDANG	62104,6	77651,1	86798,7
LANGKAT	20664,59	21720,35	23284
NIASSELATAN	1672,33	3347	8383,12

Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
	2006	2007	2008
HUMBANGHASUNDUTAN	3508,02	5969,68	6891
PAKPAKBARAT	1207,75	2415,22	3222
SAMOSIR	6575,08	20018	10711,38
SERDANGBEDAGAI	13200,18	20018	21776
SIBOLGA	7508,5	7381,21	10171,99
TANJUNGBALAI	10843,47	11567,84	44322,8
PSIANTAR	16266,48	19859,39	23591
TTINGGI	8765,95	10207,17	11810
MEDAN	320062,95	316219,72	344509,31
BINJAI	13814,59	13020,88	13609,48
PSIDEMPUAN	6135,3	10081	11400

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara (2006 - 2008)

Dari Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa kabupaten dan kota di Sumatera Utara memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah yang cukup baik di mana setiap tahunnya seluruh kabupaten/kota Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang cukup besar. Namun, terdapat ketidakstabilan jumlah Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya pada masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Ada beberapa kabupaten dan kota yang mengalami penurunan jumlah Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007 ke tahun 2008 di antaranya Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Asahan, dan Kab. Samosir. Sedangkan kabupaten atau kota yang mengalami peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah terbesar pada

tahun 2007 adalah Kab. Deli Serdang dan pada tahun 2008 kabupaten atau kota yang mengalami peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah adalah Kab. Tanjung Balai.

Sumber pendanaan Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari daerah dalam arti untuk memenuhi belanja yang dibutuhkan daerah. Data yang diperoleh dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sumatera Utara mengenai belanja daerah tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini.

Tabel 1.4
Belanja Daerah PemKab/PemKo di Sumatera Utara Tahun 2006 – 2008
(dalam juta rupiah)

Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
	2006	2007	2008
NIAS	408003,9	559324,81	606883,99
MANDAILINGNATAL	384680,71	490794,33	553401
TAPSEL	578662,16	647313,98	871650
TAPTENG	310937,19	391092,77	436656
TAPUT	345356,39	430722,75	498940,06
TOBASA	288872,42	383846,79	436569
LABUHANBATU	673421,63	738317,11	950381
ASAHAN	625444,71	792635,94	654114,14
SIMALUNGUN	652979	798418,78	880994
DAIRI	346245,5	401024,93	477963,41

Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
	2006	2007	2008
KARO	425489,37	544146,88	577259
SDELISERDANG	850673,3	1044222,08	1199051,95
LANGKAT	651117,17	815410,98	840144
NIASSELATAN	282522,27	422409,1	428918,93
HUMBANGHASUNDUTAN	255442,17	366210,48	365806
PAKPAKBARAT	178234,92	231048,83	257670
SAMOSIR	252217,97	452874,01	380693,72
SERDANGBEDAGAI	424349,67	452874	520550
SIBOLGA	212826,55	294477,84	332780,6
TANJUNGBALAI	253775,5	310708,35	379089,79
PSIANTAR	312799,84	394090,64	463653
TTINGGI	231251,38	292630,52	379010
MEDAN	1395563,11	1727143,56	1872915,72
BINJAI	301124,63	358622,62	395023
PSIDEMPUAN	247706,84	330662,51	380839

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara (2006 - 2008)

Dari Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara cenderung mengalami perubahan. Belanja Daerah (BD) seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup besar. Dengan sedikitnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh atau dihasilkan di tiap kabupaten/kota maka diperlukan

dana sumbangan dari Dana Alokasi Umum untuk memenuhi biaya Belanja Daerah yang semakin meningkat tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD) tahun sekarang di Kabupaten/Kota Sumatera Utara?
- 2) Apakah terjadi *flypaper effect* di Kabupaten/Kota Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

- 1) Pengaruh DAU dan PAD tahun lalu terhadap Belanja Daerah tahun sekarang di Kabupaten/Kota Sumatera Utara
- 2) Kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Ekonomi.

- 2) Sebagai bahan referensi tambahan dalam penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pada masa yang akan datang.

1.5. Studi Terkait

Prakosa (2004) meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY. Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect*.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maimunah (2008) dalam artikelnya yang berjudul *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Hasil analisis yang didapat adalah besarnya nilai Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi besarnya nilai belanja daerah (berpengaruh secara positif). Hasil analisis juga menunjukkan telah terjadi

pemborosan dimana belanja daerah lebih dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Diah (2007) dalam artikelnya yang berjudul *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia. menyatakan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) pada masing-masing kondisi daerah memiliki pengaruh lebih kuat terhadap Belanja Daerah (BD) daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD). Ini mengindikasikan bahwa *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Syukriy (2003) mengenai Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali)". Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa secara terpisah, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, baik dengan ataupun tanpa *lag*. Ketika tidak digunakan *lag*, pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah lebih kuat dibandingkan dana alokasi umum. Tetapi dengan menggunakan *lag*, pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah justru lebih kuat dibandingkan pendapatan asli daerah. Hal ini berarti terjadi *flypaper effect* dalam respon pemerintah daerah terhadap dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. Ketika kedua faktor tersebut (dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah) di regres secara serentak dengan belanja daerah, pengaruh

keduanya juga signifikan baik dengan ataupun tanpa *lag*. Dalam model prediksi tanpa *lag*, daya prediksi dana alokasi umum lebih rendah dari pada pendapatan asli daerah, tetapi sebaliknya dalam prediksi dengan *lag* daya prediksi dana alokasi umum lebih tinggi dari pada pendapatan asli daerah. Dengan demikian terjadi *flypaper effect*.

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Diduga DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} berpengaruh signifikan terhadap BD_t di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.
- 2) Diduga pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

1.7. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari Dana Perimbangan, selain bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi khusus (DAK), dan bantuan keuangan. DAU diterima oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan formula dan faktor-faktor lain yang ditetapkan dengan Kepres.
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini

dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Maka rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.

- 3) Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Belanja Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Maka rumus untuk menghitung belanja daerah yaitu:

BD = belanja tidak langsung + belanja langsung.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Daerah Penelitian

Penelitian mengenai *flypaper effect* dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah ini mengambil tempat di kabupaten/kota Sumatera Utara.

1.8.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah kombinasi antara data *time series* dan data *cross section* yang merupakan data panel. Dengan runtun waktu selama tiga tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah (BD) yang bersumber dari dokumen Laporan APBD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang diperoleh dari study kepustakaan (*library research*) Badan Pusat Statistik (BPS), www.bps.go.id.

1.8.3 Model

Model penelitian terbagi dua jenis, yaitu model teoritis dan model yang ditaksir. Model teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BD_t = f(DAU_{t-1}, PAD_{t-1}) \dots\dots\dots(1.1)$$

di mana :

BD_t = Belanja Daerah tahun sekarang (juta rupiah)

DAU_{t-1} = Dana Alokasi Umum tahun lalu (juta rupiah)

PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah tahun lalu (juta rupiah)

Untuk model yang diaksir, yaitu model yang digunakan pada regresi data panel.

Model yang digunakan (Syukriy, 2003)

$$BD_t = a + b_1 DAU_{t-1} + b_2 PAD_{t-1} + e \dots\dots\dots(1.2)$$

di mana :

BD_t = belanja daerah tahun sekarang (juta rupiah)

a = konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi

DAU_{t-1} = dana alokasi umum tahun lalu (juta rupiah)

PAD_{t-1} = pendapatan asli daerah tahun lalu (juta rupiah)

e = *error term*

1.8.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan belanja daerah sebagai variabel dependen dan dana alokasi umum serta pendapatan asli daerah sebagai variabel independen adalah dengan metode *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam mengestimasi data panel maka perlu dilakukan uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

1.8.5 Regresi Data Panel

Data panel merupakan gabungan data *cross section* dan data *time series* mempunyai observasi lebih banyak dibandingkan dengan data *cross section* atau data *time series* saja. Pada data panel ini, hasil regresi data panel cenderung lebih baik dibanding regresi yang hanya menggunakan data *cross section* atau data *time series* saja (Nachrowi dalam Musringatun, 2008). Beberapa keuntungan menggunakan data panel (Baltagi dalam Purnawan, 1995) adalah:

- 1) Estimasi data panel dapat mengontrol adanya masalah heterogenitas dalam tiap unit.
- 2) Dengan data panel, data lebih informatif, mengurangi kolinieritas antara variabel, meningkatkan derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan lebih efisien.
- 3) Data panel cocok digunakan untuk menggambarkan adanya dinamika perubahan.
- 4) Data panel mampu mengidentifikasi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diperoleh dari data *cross section* murni atau data *time series* murni.
- 5) Data panel bisa digunakan untuk studi dengan model yang lebih lengkap.
- 6) Data panel dapat meminimumkan bias yang mungkin dihasilkan dalam agregasi

Model regresi dengan data panel secara umum mengakibatkan kita mempunyai kesulitan dalam spesifikasi modelnya. Residualnya akan mempunyai tiga kemungkinan yaitu residual *time series*, *cross section*, maupun gabungan keduanya. Ada dua metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu metode *Fixed Effect* dan metode *Random Effect*.

1.8.6 Metode *Fixed Effect*

Teknik model *fixed effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model ini sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien slope dan residualnya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul yaitu:

- 1) Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu serta perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh residual.
- 2) Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu.
- 3) Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu.
- 4) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu.
- 5) Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu.

1.8.7 Metode *Random Effect*

Keputusan untuk memasukkan variabel *dummy* dalam model *fixed effect* tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Konsekuensi buruknya, penambahan variabel *dummy* dalam model ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menghimpun *error term* dalam upaya untuk mengakomodasi perbedaan intersep. Cara ini dikenal dengan pendekatan *random effect*. Model *random effect* sering juga disebut model komponen error (*error component model*).

1.8.8 Uji Hausman

Uji Hausman ini dilakukan untuk memilih teknik pendekatan model mana yang paling baik digunakan antara model *fixed effect* dan model *random effect* untuk penelitian. Perhitungan uji Hausman untuk pemilihan model *fixed effect* atau *random effect* secara langsung bisa didapatkan di dalam *windows Eviews*. *Eviews* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *eviews 6.0*.

Hausman *Test* adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect*. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan model *fixed effect* mengandung suatu unsur *trade off* yaitu berkurangnya derajat kebebasan seiring dengan dimasukkannya variabel *dummy*. Namun, penggunaan metode *random effect* pun harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi dari setiap komponen. Oleh karena itu perlu dilakukan pemilihan. Pemilihan tersebut didasarkan pada uji Hausman *test* yang dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H0: *Random Effects Model*

Ha: *Fixed Effect Model*

Jika $\chi_{\text{statistik}} > \chi_{\text{tabel}}$ atau $P\text{-value} < \alpha$ maka hipotesa nol ditolak sehingga model yang kita gunakan adalah model *fixed effect* dan sebaliknya.

1.9. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini akan meliputi beberapa bab dengan sistematika penulisan dengan urutan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini tentang landasan teori, dan *literature* / studi terkait penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang data dan sumber data, daerah penelitian, alat analisis dan definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi penjelasan tentang hasil perhitungan dari data yang telah dikelolah berdasarkan *Fixed Effect*, *Random Effect*, Uji Hausman, dan *Regression on Standardized Variables* dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup berisi tentang kesimpulan dari data yang dianalisis dan saran dari hasil penelitian untuk masa yang akan datang.